

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 dan dengan melihat pada instrument-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu : Target Kinerja, Tolak Ukur Kinerja, Analisa Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sepenuhnya menerapkan instrumen-instrumen yang ada dalam Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sepenuhnya melakukan upaya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada saat penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, dengan faktor yang dimaksud yaitu Sumber Daya Manusia, Koordinasi dan Jarak.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mempertahankan penggunaan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yang ada antara lain: Target Kinerja, Tolak Ukur Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal. Maka sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik lagi.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia, meningkatkan fungsi koordinasi dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan terkait jarak dengan menambah tenaga lapangan untuk membantu mempermudah arus informasi dari sekolah ke Dinas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian , Indra 2006. *Akuntansi sSektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* Edisi Ketiga. Penerbit. Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Theresia Damayati. 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri ssBunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit: Erlangga, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Narafin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung. Alfabeta.*
- Sulistio, Eko Budi. 2010. *Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). Jurnal ilmiah Administrasi publik dan pembangunan. Vol 1, No 1*
- Robinson, Last. 2009. *Model Dasar penganggaran Berbasis kinerja. Catatan Teknis dan Manual. Dana Moneter internasional. Washington.*
- Mertiana Tawa, Maria. 2019 *Evaluasi Penerapan Instrumen-Instrumen Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.*
- Wiwik Andriani, Emataty Hata. 2012. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negri Padang).*
- Vianney M. I. Lake 2017. *Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.*
- Kadek Ayu, Yulianita Dewi.2014. *Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.*
- Nahyan Zikri . 2014. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Pontianak Barat.*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2005. *Pentingnya Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.*